

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANG****Iwan Henri Kusnadi**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang\*Coessponding Author, email : [iwanhenri01@gmail.com](mailto:iwanhenri01@gmail.com)**Abstrak**

Musrenbang merupakan 'forum musyawarah' dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif, berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi publik secara meluas pada level akar rumput semacam ini, secara teoritis dan empirik, merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang sangat kompleks dan dinamis. Strategi Musrenbang masih belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput, diantaranya menyangkut masalah Sumber Daya Manusia (SDM), hasil Musrenbang belum menunjukkan konsistensi, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk eksplanasi (*explanatory* atau *confirmatory research*) yang bersifat penelitian penjelasan. Konsepsi yang dikaji dalam penelitian ini tentang faktor-faktor penentu partisipasi mulai dari pembuatan, penerapan keputusan, partisipasi dalam pencapaian hasil, serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang belum sepenuhnya optimal. Dimensi Evaluasi menjadikan faktor yang paling menentukan konstruk Partisipasi Musrenbang. Sementara itu faktor lain yang pengaruh lebih rendah antara Dimensi Menikmati Hasil, Dimensi Tahap pelaksanaan, dan Dimensi Tahap Pengambil Keputusan.

**Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan****Abstract**

*Musrenbang is a 'deliberation forum' which can be interpreted as a space and opportunity for citizen interaction to discuss something in a participatory manner, ending in agreement making or joint decision making. This widespread model of public consultation at the grassroots level, theoretically and empirically, is an effective way to encourage a sense of local ownership and have a democratic dimension. The phenomenon that is currently faced in the Musrenbang process is very complex and dynamic. The Musrenbang strategy is still not strong in resolving problems at the grassroots, including regarding the issue of Human Resources (HR), the results of the Musrenbang have not shown consistency, and others. This research uses a quantitative approach in the form of explanation (explanatory or confirmatory research) which is an explanatory research. The conceptions examined in this study about the determinants of participation starting from making, applying decisions, participating in achieving results, and evaluating. The results showed that community participation in the implementation of Musrenbang in Subang was not yet optimal. The Evaluation Dimension makes the most determining factor in the construct of Musrenbang Participation. Meanwhile other factors which influence are lower between the Enjoyment Dimensions, the Implementation Stage Dimensions, and the Decision Making Dimensions.*

**Keywords: Community Participation, Development Planning Conference (Musrenbang).**

**PENDAHULUAN**

Prinsip otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab saat ini menjadi pilihan yang dipakai dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari tuntutan Reformasi. Adanya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat memberikan kesempatan sekaligus keleluasaan kepada daerah di Indonesia untuk mengembangkan, meningkatkan dan menetapkan strategi dalam upaya memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara tepat, efektif dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah. Kesempatan tersebut lebih dipertegas lagi dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tuntutan demokratisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tuntutan Agenda Reformasi nasional, melalui berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah saat ini dengan tetap berdasarkan prinsip tertinggi dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui sistem perencanaan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan sistematis.

Sistem Perencanaan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut : mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Subang sejalan dengan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tidak dapat dianggap sederhana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, diantaranya tersebut yakni Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2013 penduduk miskin sebesar 12,13 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 10,27 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,86 persen. Meskipun terjadi penurunan, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Subang masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Subang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah juga berupaya untuk meminimalisasinya dengan

menggalakan program Keluarga Berencana. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; Belum adanya standar mutu produk IKM/UMKM yang sesuai dengan tuntutan zaman dan konsumen serta Kurangnya promosi Produk IKM/UMKM. Selain itu terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh rendahnya tindak lanjut investasi. Di sektor pertanian semakin rendahnya minat masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi pelaku pembangunan pertanian yang diakibatkan oleh kurang menariknya sektor pertanian jika dilihat dari aspek ekonomi dan sosial kultural sehingga sulit mencari tenaga kerja saat musim tanam dan panen.

Rendahnya efisiensi pembangunan pertanian, kesuburan tanah yang semakin berkurang, sempitnya aksesibilitas petani sampai dengan anomali iklim yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan gagal panen menjadi faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang.

Pada bidang ketahanan pangan masih terdapat beberapa masalah, seperti belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan pangan, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal serta belum optimalnya pengembangan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan

(yang meliputi aspek input, ketersediaan, distribusi dan konsumsi).

Kabupaten Subang sedang memacu program-program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi, Kabupaten Subang. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang 2018-2023 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan kabupaten Subang yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2018– 2023 adalah sebagai berikut : *“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”*. Dalam rangka mengimplementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Program unggulan dimaksud adalah 9 Program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera) “ yaitu JAWARA NATA (Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, serta Perhubungan), JAWARA NIAGA (Perindustrian, Perdagangan, dan KUMKM), JAWARA WISATA (Pariwisata dan Seni serta Budaya), JAWARA RAGA (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan), JAWARA DAYA (Pendidikan dan Keagamaan), JAWARA MIARA (Peternakan dan Perikanan), JAWARA PAKAYA (Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan), JAWARA RIKSA (Lingkungan Hidup) dan JAWARA NAGARA (Reformasi Birokrasi dan Hukum). Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Subang, ditandai dengan:

- 1) Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah agribisnis;
- 2) Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah industri yang maju;
- 3) Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah pariwisata;
- 4) Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur wilayah sebagai penunjang perekonomian dan pelayanan serta industri dan pariwisata;
- 5) Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan dengan semakin efektif dan efisiennya sistem pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;
- 6) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat.

Untuk merealisasi visi dan misi diatas maka Sistem Perencanaan tersebut merupakan syarat penting karena sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam kurun waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun melalui serangkaian proses yang terbagi dalam 4 tahapan yaitu evaluasi kinerja,

penyusunan rancangan masing-masing rencana, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pengesahan rencana. Bahkan saat ini strategi pembangunan fokus di tingkat desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa/kelurahan, sehingga apabila masyarakat desa/kelurahan nya sejahtera, maka dengan sendirinya sebuah kabupaten akan menjadi sejahtera.

Hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bawa setiap setiap penyusunan dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD yang dilakukan 20 tahun sekali.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 poin 3 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Subang, Musrenbang

RPJMD yang dilakukan 5 tahun sekali dan Musrenbang RKPD yang dilakukan 1 tahun sekali.

Musrenbang merupakan simpul koordinasi perencanaan pembangunan untuk mensinkronkan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi dari masyarakat sesuai kondisi permasalahan yang obyektif dan didukung oleh data-data yang akurat. Musrenbang sebagai 'forum musyawarah' dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif Dan, berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.

Model konsultasi publik secara meluas pada level akar rumput semacam ini, secara teoritis dan empirik, merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi deliberasi (permusyawaratan), dimana masyarakat bermusyawarah dan belajar bersama secara lokal. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang bahwa permasalahan-permasalahannya sangat kompleks dan dinamis.

Strategi Musrenbang masih belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan di akar rumput. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung keterwakilan yang berkapasitas baik belum dapat diwujudkan dimana perwakilan masyarakat (delegasi) harus

memiliki kemampuan dan cakap dalam menjalankan tugas tidak terlihat, hal ini terlihat dari perwakilan masyarakat (dedelegasi) tidak mampu mempertahankan usulan dari daerahnya. Kebijakan kebijakan dari hasil Muisrenbang belum menunjukkan konsistensi dengan permasalahan real berdasarkan kepentingan dan harapan masyarakat. Musrenbang yang melandaskan pada partisipasi masyarakat yang lebih nyata menjadi sangat urgent sehingga perlu diperkuat dari waktu ke waktu.

Dari permasalahan penelitian tersebut dapat dikaji konsep yang relevan, yaitu tentang faktor-faktor yang menentukan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Slamet (1994: 61-63) dimana yang menentukan partisipasi ke beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk

sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Cohen dan Uphoff (1994: 61-63) menjelaskan faktor-faktor penentu partisipasi mulai dari pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan keputusan, partisipasi dalam pencapaian hasil, serta yang perlu ditambahkan partisipasi dalam evaluasi. Salah satu syarat yang diajukan Cohen dan Uphoff adalah "*empowerment*" Efektivitas keikutsertaan warga masyarakat sangat ditentukan oleh berapa banyak kekuatan yang dipunyainya. Pembuatan keputusan secara lebih spesifik dalam partisipasi ini berpusat pada pengumpulan gagasan, perumusan pilihan-pilihan (*option*), evaluasi pilihan, tindakan memilih, dan merumuskan strategi untuk melakukan pilihan terhadap dampak yang timbul. Dalam hal ini

dikenal tiga macam tipe keputusan: (1) *initial decisions*, (2) *on going decisions*, dan (3) *operational decisional*

Implementasi, untuk berperan serta dalam aspek ini dalam satu program dapat dilakukan melalui tiga cara yakni: (1) kontribusi sumber daya (*resource contributions*), (2) usaha-usaha administrasi dan koordinasi, (3) terlibat dalam program (*programme enlismment activities*). *Benefit*, terlibat dalam suatu program sedikitnya dapat menarik tiga macam keuntungan: (1) material, (2) sosial, dan (3) personal. Keuntungan material yaitu keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pokok individual. Keuntungan sosial yaitu, keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Keuntungan personal biasanya berkaitan dengan keinginan yang bersifat individual dengan melibatkan diri dalam suatu kelompok/organisasi yang memiliki kekuasaan maupun sosial dalam suatu program.

Evaluasi, untuk berperan serta dalam evaluasi pro, gram dapat dilakukan melalui dua kegiatan pokok yakni: (1) evaluasi formal terhadap proyek, (2) pendapat umum. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada saat ini, manajemen pengembangan sumberdaya yang berwawasan lokal begitu mencuat, model pembangunannya menekankan pada pelaksanaan implementasi

program-program dari arus papan bawah, yakni melihat sampai dimana peran serta masyarakat tidak hanya orang dipengaruhi dan dikenai pembangunan saja yang menyukai partisipasi, akan tetapi juga para perencana pembangunan (birokrat pemerintah) menginginkan agar rakyat berpartisipasi bukan hanya karena agar bisa menyumbangkan peran aktifnya dalam setiap langkah dari proses pembangunan ini, tetapi mulai dari pelaksanaan sampai ke monitoringnya (Morss, 1976 dalam Thoha, 1987).

Adapun keuntungan yang diperoleh dengan adanya partisipasi dalam pelaksanaan-pelaksanaan program pembangunan ini antara lain sebagai berikut:

1. Banyak kegiatan pembangunan tidak bisa keluar dari lilitan persoalan, jika rakyat yang dikenai proyek tidak terlibat. Sumber daya lokal merupakan sumber daya yang mengetahui kondisi dan potensi daerah. Jika timbul masalah hanya orang-orang lokal yang memahaminya.
2. Dengan partisipasi, perencana dilengkapi dengan informasi amat berharga, yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Dengan kata lain, partisipasi informasi yang sangat berharga akan diperoleh *planner* dan para birokrat, sedangkan cara-cara lain barangkali tidak seberharga partisipasi,

3. Masyarakat akan sangat menerima perubahan yang diadakan jika mereka diajak berperan serta di dalam merancang, mengkonstruksi, melaksanakan, sampai pada saat mengevaluasi.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang partisipasi dan Musrenbang diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hanafie (2015) dari Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perspektif *Effective Governance* (Studi Kasus Partisipasi Musrenbang pada Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten). Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Musrenbang perpektif kinerja dapat dikategorikan sedang, partisipasi publik tinggi. Sedangkan perspektif akuntabilitas masih rendah. Penelitian ini melihat bahwa terdapat koordinasi yang kurang dari pihak SKPD dan adanya intervensi dalam pelaksanaan hasil Musrenbang oleh politisi (anggota DPRD).

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Fita Fitriyah (2018) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang berjudul : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kota Cilegon. Hasil penelitian menunjukkan Musrenbang di Kota Cilegon sudah

berjalan secara optimal. Namun dalam pelaksanaan Musrenbang masih memiliki kekurangan dalam penyiapan segala teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi belum merata dari kelurahan, kecamatan maupun Bappeda. Hasil penelitian juga menunjukkan berbagai permasalahan dalam pembangunan di Cilegon karena pelibatan masyarakat masih kurang; artinya bentuk perencanaan partisipatif masih kurang maksimal. Fakta di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu adanya Musrenbang, serta belum maksimalnya tingkat keterwakilan dari masyarakat maupun elemen pemerintahan.

Bila kita pahami dengan baik bahwa Musrenbang kabupaten dan kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kabupaten dan kota yang melibatkan para pelaku pembangunan kabupaten dan kota. Tujuannya adalah: (1). Penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya; (2). Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan; (3).

Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti yang akan datang. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang berguna berkaitan dengan konsep dan konteks partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Daerah.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk eksplanasi (*explanatory* atau *confirmatory research*) yang bersifat penelitian penjelasan. Penelitian ini difokuskan pada menyoroti variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut (Singarimbun, 2005:5) Metode eksplanasi adalah suatu metode yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dengan cara menganalisis variabel-variabel yang ditelitinya. Dalam penelitian ini

populasi dari unit analisis seluruhnya berjumlah 300 orang yang merupakan *stakeholder* Musrenbang, Adapun populasi dari unit analisis seluruhnya berjumlah 300 orang yang merupakan *stake holder* Musrenbang, Delegasi Desa/Kelurahan, Unsur Unit Kerja Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, LSM. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat. Dalam penelitian ini populasi dari unit analisis seluruhnya berjumlah 300 orang yang merupakan *stakeholder* Musrenbang, Adapun populasi dari unit analisis seluruhnya berjumlah 300 orang yang merupakan *stake holder* Musrenbang, Delegasi Desa/Kelurahan, Unsur Unit Kerja Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, LSM. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat. Namun dalam jenis analisis multivariate yang menggunakan variabel laten, penulis akan menggunakan PLS – SEM dengan penentuan *sample size* yang tidak mengacu pada penghitungan formula/ rumus tertentu. Pada penelitian yang menggunakan Teknik PLS – SEM, tidak diperlukan sampel penelitian yang besar. Menurut (Ghozali, 2008) besaran sampel yang direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100 kasus, dengan asumsi bahwa semakin besar sampel, maka akan lebih tinggi akurasi data hasil penelitiannya. Dengan pertimbangan berbagai keterbatasan, penulis menentukan besaran sampel

sebanyak 75 orang untuk dijadikan responden penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisis beberapa literatur atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas, seperti : buku, majalah, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada lokasi/objek penelitian teknik yang digunakan sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan

cara mengamati langsung ke objek penelitian untuk melihat dan mencatat kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang berkompeten yang ada relevansinya dengan bahasan yang sedang diteliti.
- c. Instrumen penelitian yaitu kuesioner, adalah sebagai bentuk interview dimana responden menerima dengan pernyataan tertulis.

Untuk lebih memperjelas model penelitian, penulis akan mengemukakan operasionalisasi variabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Tabel Operasionalisasi Konstruk Partisipasi**

Konstruk Penelitian	Indikator	Kode	Skala	No. Item
Partisipasi Masyarakat	1. Dimensi Pengambilan Keputusan			
	a. Peluang untuk mengemukakan gagasan	PK-1	Ordinal	1
	b. Keterlibatan dalam perumusan perencanaan	PK-2	Ordinal	2
	c. Keterlibatan merumuskan strategi	PK-3	Ordinal	3
	2. Pelaksanaan			
	a. kontribusi sumber daya	P-1	Ordinal	4
	b. Upaya administratif dan koordinasi	P-2	Ordinal	5
	c. Keterlibatan dalam program	P-3	Ordinal	6
	3. Evaluasi			

a. Evaluasi formal terhadap proyek	E-1	Ordinal	7
b. Menyampaikan pendapat	E-2	Ordinal	8
4. Benefit			
a. Keuntungan personal	B-1	Ordinal	9
b. Keuntungan social	B-2	Ordinal	10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Instrumen

#### Pengujian Validitas Instrumen

Seperti yang telah dikemukakan dalam desain pengujian validitas instrumen, maka penulis akan melakukan pengujian terhadap setiap instrumen berdasarkan validitas isi. Pengujian dilakukan menurut indikator masing-masing. Penghitungan atau uji validitas instrumen ini dilakukan dengan menggunakan *Statistical Programming for Social Science (SPSS) versi 16.0*. Pengujian validitas instrumen ini dilakukan pada 38 orang responden. Setelah ditemukan adanya

pernyataan pada instrumen yang secara statistik tidak memenuhi persyaratan keandalan, penulis memperbaiki kalimat statement tersebut dan mengulangi pengisian kuesioner serta uji validitas hingga koefisien korelasinya sama dengan atau di atas 0,30 sebagai angka kritis. Pengujian yang penulis lakukan tidak sampai pada titik dimana ada salah satu atau lebih indikator dikeluarkan dari model, karena hasil penghitungannya tetap di bawah angka 0,30. Adapun hasil uji validitas antar butir atas instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Validitas Instrumen**  
**Partisipasi masyarakat**

Dimensi	Kode Butir	Korelasi antara Butir & Skor (Tx)	Batas Minimum	Kesimpulan
PARTISIPASI MASYARAKAT	X 1	0.675	0,3	valid
	X 2	0.650	0,3	valid
	X 3	0.641	0,3	valid
	X 4	0.659	0,3	valid
	X 5	0.785	0,3	valid
	X 6	0.689	0,3	valid
	X 7	0.741	0,3	valid
	X 8	0.464	0,3	valid
	X 9	0.515	0,3	valid
	X 10	0.785	0,3	valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari keterangan di atas dari 9 butir diketahui validitas tertinggi adalah dengan koefisien korelasi sebesar 0,785. Hasil pengujian keabsahan tersebut mengindikasikan instrumen partisipasi masyarakat dinyatakan semuanya valid. Oleh karena itu data dari instrumen tersebut dapat dianalisis lebih lanjut.

**Pengujian Reliabilitas Instrumen**

Untuk pengujian reliabilitas instrumen, Penulis menggunakan metode konsistensi antar butir yakni dengan rumus *Cronbach's Alpha*. Jika koefisien *Alpha Cronbach* telah

ditemukan, kemudian dibandingkan kriteria dimana untuk reliabilitas kurang dari 0,6 menunjukan instrumen dianggap "kurang baik", apabila di sekitar angka 0,7 dikategorikan 'dapat diterima' dan untuk nilai reliabilitas di atas 0,8 digolongkan sebagai reliabilitas yang "baik".

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Statistik Programme For Social Science (SPSS) versi 16.0.*, untuk variabel Partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan akta jual beli tanah, maka hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen**  
**Variabel Partisipasi Masyarakat**  
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	75	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	75	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.859	.857	10

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Cronbach's alpha ( $\alpha$ ) sebesar 0,859. Karena nilai

reliabilitasnya di atas angka 0,8 dikategorikan "baik", maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

**Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat**

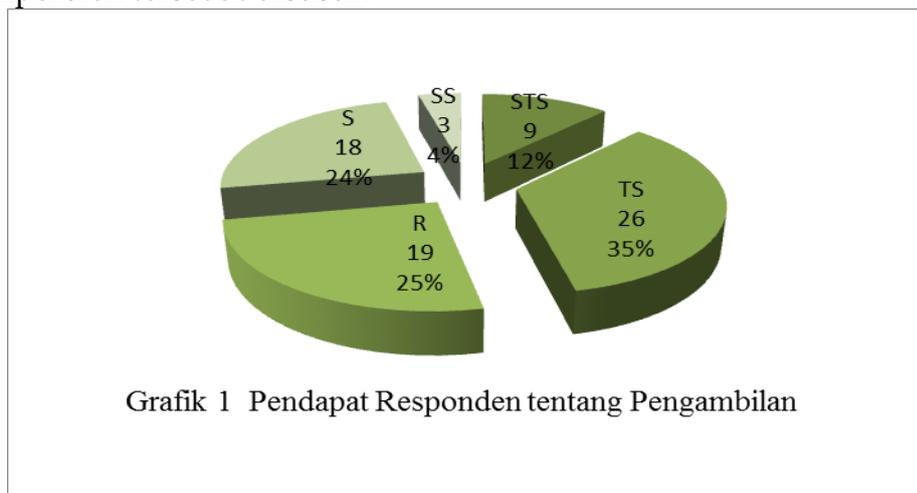
Untuk menganalisis variabel partisipasi masyarakat ini, penulis menggunakan konsep pengukuran melalui 10 indikator yang terhimpun dalam 4 dimensi. Dimensi yang kemudian diuraikan menjadi dimensi penelitiannya adalah tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati hasil.

Pengolahan data pada dimensi ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi jawaban pilihan responden yang ditabulasikan dalam matriks pada lampiran. Kemudian untuk lebih dapat mendeskripsikan secara jelas tentang variasi jawaban responden atas pernyataan yang diajukan, maka data mentah yang diperoleh tersebut disusun

ke dalam tabel distribusi frekuensi yang dibedakan menurut variabelnya masing-masing, kemudian dihitung peringkat tiap pernyataan dari kedua variabel yang diteliti.

**Dimensi Tahap Pengambilan Keputusan**

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) mengemukakan bahwa tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Untuk mengetahui tanggapan responden atas dimensi menentukan tahap pengambilan keputusan penulis menyusun 2 indikator, dengan penjelasan:



Grafik 1 Pendapat Responden tentang Pengambilan

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Melalui akumulasi jawaban responden dapat dilihat paling banyak

responden memberikan jawaban tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 26 (35%),

dan hanya sebanyak 3. (4%) memberikan jawaban sangat setuju skor 5, artinya sebagian besar responden

menilai dimensi pengambilan keputusan sangat cukup dapat dilihat pada tabel berikut:

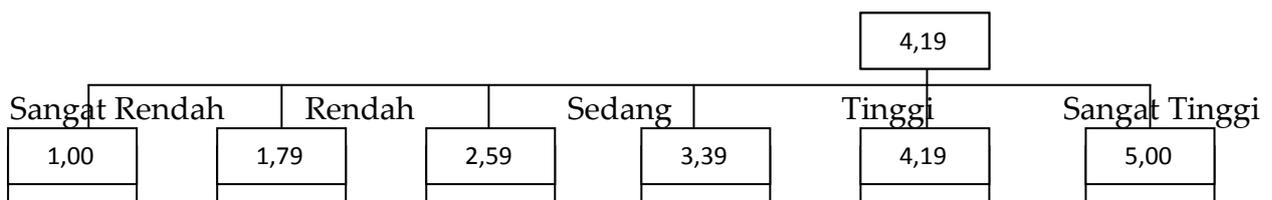
**Tabel 4**  
**Dimensi Pengambilan Keputusan**

No	Indikator	Jawaban					Σ	Indeks	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Peluang untuk mengemukakan gagasan	9	26	19	18	3	75	205	2,733
2	Keterlibatan dalam perumusan perencanaan	10	19	23	14	9	75	218	2,907
3	Keterlibatan merumuskan strategi	5	25	17	18	10	75	228	3,040
Jumlah									2,893

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan pengukuran dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan 5, maka angka indeks rata-rata sebesar 2,89 yang diraih oleh Dimensi Pengambilan Keputusan pada

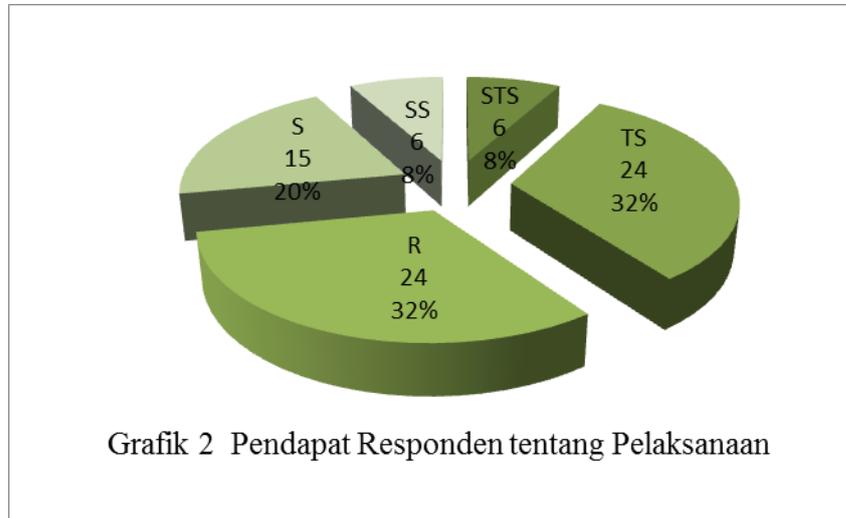
aturan ini termasuk pada kategori sedang. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pada Dimensi Tahap Pengambil Keputusan pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.

**Dimensi Tahap Pelaksanaan**

Untuk mengetahui tanggapan responden atas dimensi Tahap Pelaksanaan hasil grafiknya sebagai berikut:



Grafik 2 Pendapat Responden tentang Pelaksanaan

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Melalui akumulasi jawaban responden dapat dilihat paling banyak responden memberikan jawaban tidak setuju dan ragu dengan skor 2 dan 3 sebanyak 24 (32%), dan hanya sebanyak

6 (8%) memberikan jawaban sangat tidak setuju dan sangat setuju skor 1 dan 5, artinya sebagian besar responden menilai Dimensi Tahap Pelaksanaan cukup dapat dilihat pada tabel berikut :

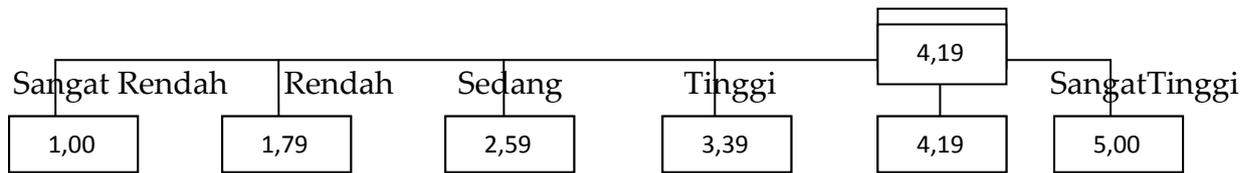
**Tabel 5**  
**Dimensi Tahap Pelaksanaan**

No	Indikator	Jawaban					Σ	Indeks	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Kontribusi sumber daya	6	24	24	15	6	75	216	2,880
2	Upaya administratif dan koordinasi	7	27	18	16	7	75	214	2,853
3	Keterlibatan dalam program	8	21	22	15	9	75	221	2,947
Jumlah									2,893

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan pengukuran dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan 5, maka angka indeks rata-rata sebesar 2,893 yang diraih oleh Dimensi Pelaksanaan pada aturan ini termasuk pada kategori sedang. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang

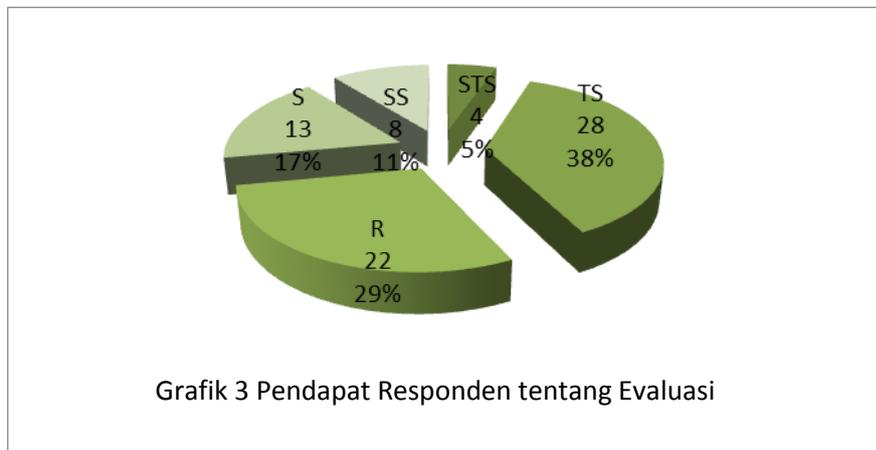
antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pada Dimensi Tahap Pelaksanaan pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.

**Dimensi Tahap Evaluasi**

Untuk mengetahui tanggapan responden atas dimensi Tahap Evaluasi hasil grafiknya sebagai berikut :



Sumber : Hasil Penelitian 2019

Melalui akumulasi jawaban responden dapat dilihat paling banyak responden memberikan jawaban tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 28 (38%), dan hanya sebanyak 4 (5%) memberikan

jawaban sangat tidak setuju skor 1, artinya sebagian besar responden menilai Dimensi Tahap Evaluasi cukup dapat dilihat pada tabel berikut:

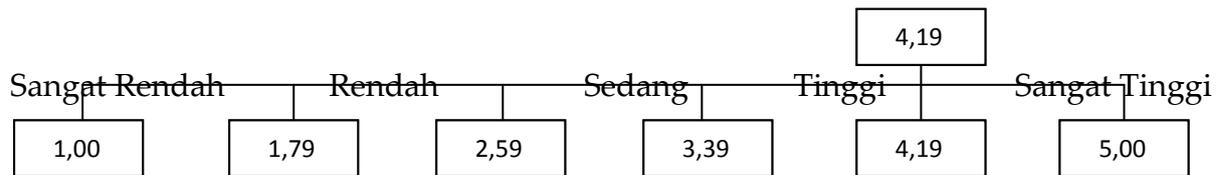
**Tabel 6**  
**Dimensi Tahap Evaluasi**

No	Indikator	Jawaban					Σ	Indeks	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Evaluasi formal terhadap proyek	4	28	22	13	8	75	218	2,907
2	Menyampaikan pendapat	8	21	23	16	7	75	218	2,907
Jumlah									2,907

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan pengukuran dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan 5, maka angka indeks rata-rata sebesar 2,907 yang diraih oleh Dimensi Tahap Evaluasi pada aturan ini

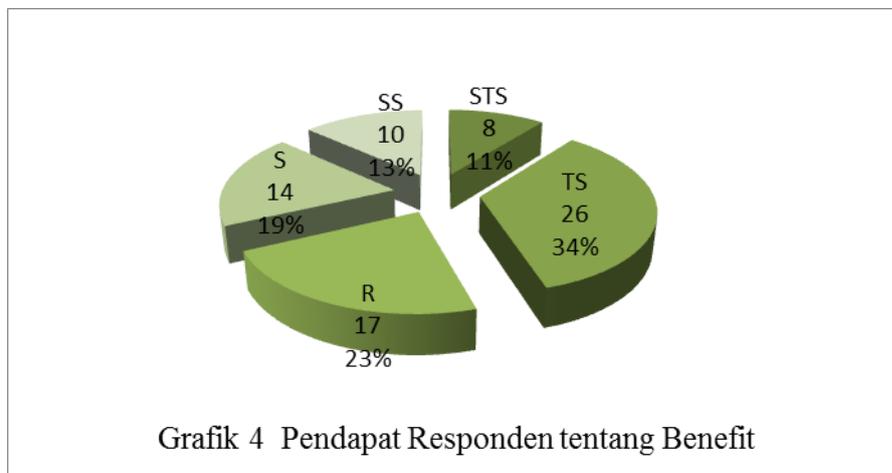
termasuk pada kategori sedang. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pada Dimensi Tahap Evaluasi pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.

**Dimensi Tahap Benefit**

Untuk mengetahui tanggapan responden atas dimensi Tahap Evaluasi hasil grafiknya sebagai berikut :



Sumber : Hasil Penelitian 2019

Melalui akumulasi jawaban responden dapat dilihat paling banyak responden memberikan jawaban tidak setuju skor 2 sebanyak 26 (34%), dan hanya sebanyak 8 (11%) memberikan

jawaban sangat tidak setuju skor 1, artinya sebagian besar responden menilai Dimensi Benefit cukup dapat dilihat pada tabel berikut:

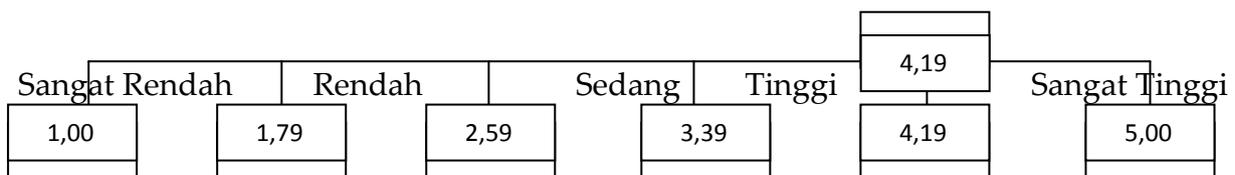
**Tabel 7**  
**Dimensi Benefit**

No	Indikator	Jawaban					Σ	Indeks	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Keuntungan personal	8	26	17	14	10	75	217	2,893
2	Keuntungan sosial	12	26	15	13	9	75	206	2,747
Jumlah									2,82

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan pengukuran dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan 5, maka angka indeks rata-rata sebesar 2,82 yang diraih oleh Dimensi Benefit pada aturan ini

termasuk pada kategori sedang. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada renaatang antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pada Dimensi Benefit pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.

**Analisis Data**

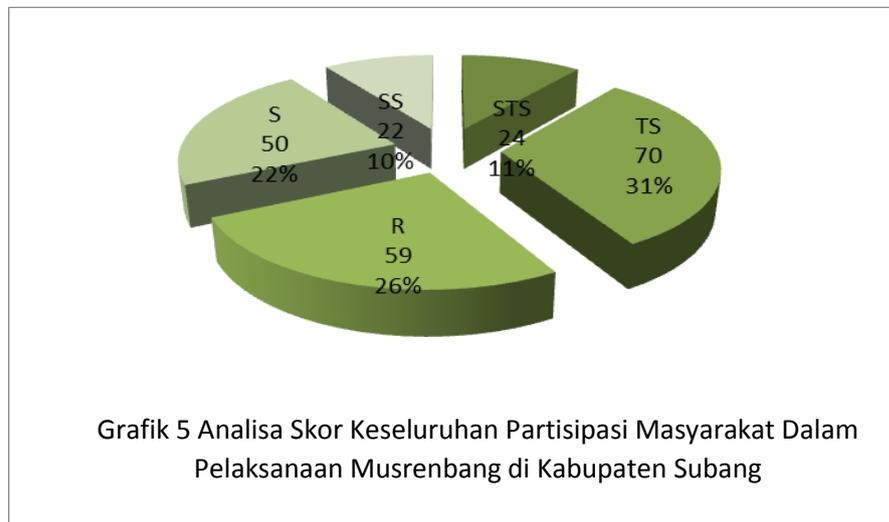
**Analisis Operasionalisasi Konstruksi Partisipasi**

Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi, 2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati hasil.

Dalam kontruks Partisipasi pada penelitian ini penulis akan mendiskripsikan pernyataan jawaban responden yang terdiri dari 4 Dimensi dengan 10 Indikator. Adapun diskripsi dari data skor keseluruhan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Musrenbang di Kabupaten Subang dapat dilihat dari grafik berikut :



Sumber : Hasil Penelitian 2019

Melalui akumulasi jawaban responden dapat dilihat paling banyak responden memberikan jawaban tidak setuju skor 2 sebanyak 70 (31%), dan hanya sebanyak 22 (10%) memberikan jawaban sangat setuju skor 5, artinya

sebagian besar responden menilai Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang masih cukup:

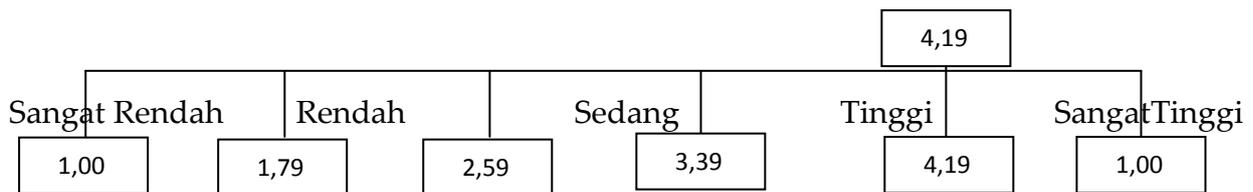
**Tabel 8**  
**Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kab.Subang**

No	Indikator	Jawaban					Σ	Indeks	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Peluang untuk mengemukakan gagasan	9	26	19	18	3	75	205	2,733
2	Keterlibatan dalam perumusan perencanaan	10	19	23	14	9	75	218	2,907
3	Keterlibatan merumuskan strategi	5	25	17	18	10	75	228	3,040
4	kontribusi sumber daya	6	24	24	15	6	75	216	2,880
5	Upaya administratif dan koordinasi	7	27	18	16	7	75	214	2,853
6	Keterlibatan dalam program	8	21	22	15	9	75	221	2,947
7	Evaluasi formal terhadap proyek	4	28	22	13	8	75	218	2,907
8	Menyampaikan pendapat	8	21	23	16	7	75	218	2,907
9	Keuntungan personal	8	26	17	14	10	75	217	2,893
10	Keuntungan sosial	12	26	15	13	9	75	206	2,747
Jumlah									2,881

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan pengukuran dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan 5, maka angka indeks rata-rata sebesar 2,881 yang diraih oleh Dimensi Benefit pada aturan ini

termasuk pada kategori sedang. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kontruks Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Musrenbang**

Dalam menganalisis faktor yang paling berpengaruh pada model penelitian ini, pertama-tama harus dijelaskan bahwa yang dianalisis adalah Konstruk laten yaitu Partisipasi Musrenbang. Pada Konstruk ini akan diukur faktor atau dimensi mana yang paling mempengaruhi Partisipasi Musrenbang sebagai Konstruk Penelitian beserta besaran residualnya (*error*), sehingga menghasilkan besaran pengaruh ( $\beta$ ). Selain itu juga akan diukur pengaruh Dimensi lain terhadap Konstruk laten yang tidak diteliti ( $\epsilon$ ).

Karena Konstruk yang dianalisis dalam model kausalitas ini berbentuk

Variabel Laten, maka alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM), karena yang dilakukan adalah analisis Univariate atas satu Konstruk, maka digunakan pengujian model pengukuran atau analisis faktor konfirmatori.

Model pengukuran adalah model yang menjelaskan keterkaitan antara Konstruk Laten dengan Dimensi dan Indikatornya. Dalam penelitian ini setiap Dimensi terwakili oleh beberapa item indikator sehingga untuk mendapatkan skor yang akan menjadi input dalam pengujian yang menggunakan *Software SmartPLS* yang secara khusus menggunakan alat analisis berupa analisis faktor konfirmatori tipe *first order confirmatory factor analysis*.

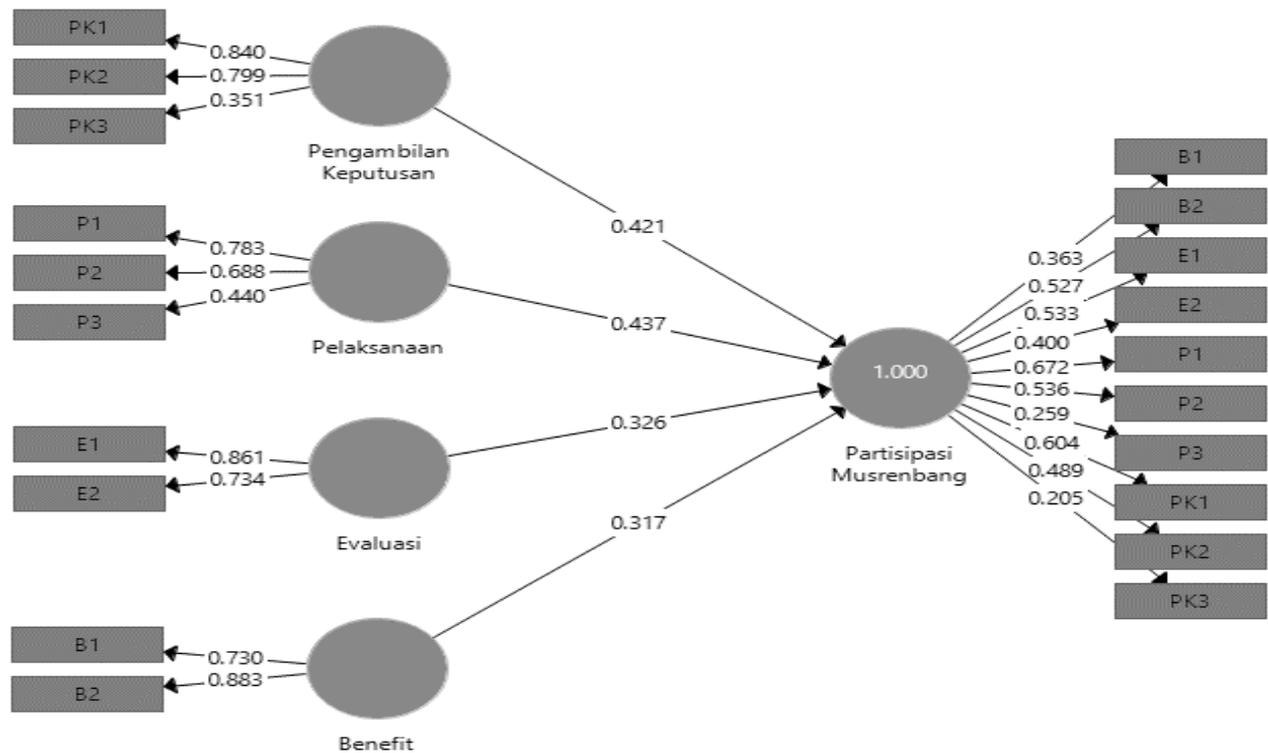
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa analisis dalam *Structural Equation Modelling*, Konstruk laten yang akan diukur harus dianalisis terlebih dahulu hubungan Konstruk

dengan indikatornya. Untuk itu dalam tesis ini digunakan analisis model pengukuran dengan menggunakan *first order confirmatory factor analysis*. Melalui analisis ini dapat diperoleh informasi apakah data pada indikator-indikator tersebut valid atau reliabel dalam menjelaskan Konstruknya. Selain itu, melalui pengujian pada model pengukuran ini, dari keseluruhan yang digunakan untuk mengukur Konstruk laten, akan diketahui indikator mana yang paling mampu merefleksikan Konstruk laten yang diukur sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara dominan mampu menggambarkan perubahan-perubahan dari Konstruk laten dan fakto-faktor ini tataran implementasi dapat lebih diprioritaskan.

Analisis model pengukuran identik dengan analisis validitas dan reliabelitas indikator dalam mengukur Konstruknya. Sebuah indikator dinyatakan valid dalam mengukur Konstruk nya jika memiliki *loading factor* lebih besar dari 0.5 atau secara statistik koefisien ini memiliki makna kuantitatif. Adapun reliabilitas indikator-indikator dari Dimensi dalam mengukur Konstruk latennya dilihat

dari koefisien reliabilitas konstruk (*konstruk reliability*). Jika reliabilitas konstruk nilainya lebih besar dari 0.70 maka secara umum indikator-indikator tersebut dinyatakan reliabel. Nilai reliabilitas konstruk juga sering diartikan sebagai besarnya keragaman dari Konstruk laten yang dapat direfleksikan oleh indikator-indikatornya. Selain menggunakan ukuran reabilitas konstruk, pengujian reabilitas Dimensi juga dilengkapi dengan ukuran yang dikenal dengan *variance extrated*. Secara konseptual, *variance extrated* mengukur seberapa besar keragaman dari setiap Dimensi terangkum oleh Konstruk latennya. Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang direfleksikan oleh 10 indikator yang pada analisis deskriptif terangkum dalam 4 Dimensi, yaitu Dimensi Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Benefit. Indikator-indikator pada keempat Dimensi ini selanjutnya akan menjelaskan atau merefleksikan Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang. Hasil perhitungan untuk Koefisien jalur (*factor loading*) dari Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang ( $\xi$ ) terhadap ke 10 indikatornya ditampilkan melalui gambar di bawah ini :

**Gambar 1 Diagram Path Analysis Model Algoritma Konstruk Partisipasi Musrenbang:**



Data selengkapnya hasil evaluasi model pengukuran pada Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang dapat dilihat pada lampiran. Adapun

rangkuman hasil penghitungan koefisien jalur disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 9**  
**Rangkuman Evaluasi Model Pengukuran Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang**

Indikator	Loading	R2	Error	t	Ket.
	Factor		Variance	tabel	
Peluang untuk mengemukakan gagasan (X1)	0,84	0,71	2,27	1,96	Valid
Keterlibatan dalam perumusan perencanaan (X2)	0,799	0,64	4,81	1,96	Valid
Keterlibatan merumuskan strategi (X3)	0,351	0,12	3,99	1,96	Tidak Valid
kontribusi sumber daya (X4)	0,783	0,61	6,1	1,96	Valid
Upaya administratif dan	0,688	0,47	5,27	1,96	Valid

Indikator	Loading Factor	R2	Error Variance	t tabel	Ket.
koordinasi (X5)					
Keterlibatan dalam program (X6)	0,44	0,19	2,99	1,96	Tidak Valid
Evaluasi formal terhadap proyek (X7)	0,861	0,74	2,14	1,96	Valid
Menyampaikan pendapat (X8)	0,734	0,54	4,22	1,96	Valid
Keuntungan personal (X9)	0,73	0,53	3,36	1,96	Valid
Keuntungan sosial (X10)	0,883	0,78	3,9	1,96	Valid
<i>Construct reliability</i>	0,77				Reliabel

Tabel 9 Menyajikan hasil penghitungan model Pengukuran Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang sebagai Konstruk Eksogen dan Variabel Independent. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua indikator memiliki koefisien jalur yang lebih dari 0,50 sehingga dapat dinyatakan bahwa mampu merefleksikan peran Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang. Hanya indikator Keterlibatan merumuskan strategi (X<sub>3</sub>), indikator Upaya administratif dan koordinasi (X<sub>5</sub>) dan indikator Keterlibatan dalam program (X<sub>6</sub>) yang nilai loading factornya < 0,50 dan dinyatakan tidak Valid, Sehingga terbukti bahwa dua indikator tersebut tidak mampu merefleksikan peran Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang. Sementara itu, nilai koefisien reliabilitas Konstruk (*construct reliability*) memiliki nilai sebesar 0,77

yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan semua indikator secara konsisten mengukur Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang.

Nilai reliabilitas kontruk memberikan gambaran bahwa sebesar 0,77 perubahan dari Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang dapat direfleksikan oleh 7 indikator dari 10 indikator. Dari 7 indikator yang dinilai valid, ternyata indikator Keuntungan sosial (X<sub>10</sub>) merupakan indikator yang paling mampu menjelaskan praktek Partisipasi Musrenbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D). Sementara itu dari 7 indikator yang Valid tersebut, tercatat bahwa indikator Keuntungan personal (X<sub>9</sub>) merupakan indikator yang paling lemah dalam merefleksikan Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang.

Pengaruh Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang terhadap masing-masing indikator (tanpa menghitung indikator Keterlibatan merumuskan strategi ( $X_3$ ), Upaya administratif dan koordinasi ( $X_5$ ) dan Keterlibatan dalam program ( $X_6$ ), karena memang nilai koefisien jalurnya

> 0,50) dihitung dengan koefisien destriminasi (KD), yaitu pengkuadratan dari koefisien korelasi ( $R^2$ )  $\times$  100%. Dengan demikian, maka interpretasi atas Koefisien Determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Interpretasi Atas Koefisien Determinasi Tiap Indikator Pada Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang**

Indikator	R <sup>2</sup>	KD	Keterangan
(X <sub>1</sub> )	0,84	84%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 84% terhadap indikator Peluang untuk mengemukakan gagasan
(X <sub>2</sub> )	0,799	79,9%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 79,9% terhadap indikator Keterlibatan dalam perumusan perencanaan
(X <sub>3</sub> )	0,351	35,1%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 35,1% terhadap indikator Keterlibatan merumuskan strategi
(X <sub>4</sub> )	0,783	78,3%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 78,3% terhadap indikator kontribusi sumber daya
(X <sub>5</sub> )	0,688	68,8%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 68,8% terhadap indikator Upaya administratif dan koordinasi
(X <sub>6</sub> )	0,44	44%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 44% terhadap indikator Keterlibatan dalam program
(X <sub>7</sub> )	0,861	86,1%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 86,1% terhadap indikator Evaluasi formal terhadap proyek
(X <sub>8</sub> )	0,734	73,4%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 73,4% terhadap indikator Menyampaikan pendapat
(X <sub>9</sub> )	0,73	73%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 73% terhadap indikator Keuntungan personal
(X <sub>10</sub> )	0,883	88,3%	Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 88,3%

---

Indikator	R <sup>2</sup>	KD	Keterangan
-----------	----------------	----	------------

---

terhadap indikator Keuntungan Sosial

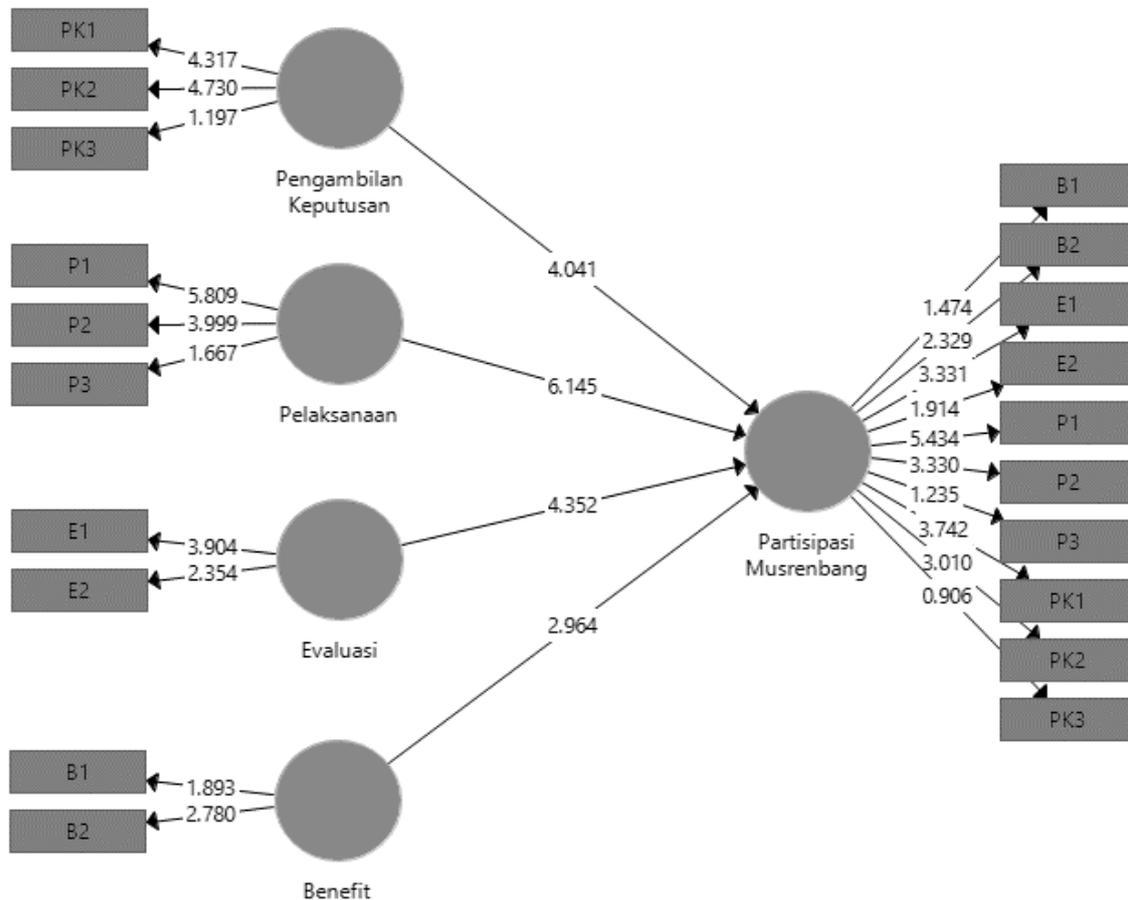
---

*Output* keseluruhan hasil analisis model pengukuran untuk Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Laten Partisipasi Musrenbang ini selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tesis. Dari tabel 10 bahwa indikator yang paling berpengaruh pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang adalah indikator Peluang untuk mengemukakan gagasan ( $X_1$ ), indikator Evaluasi formal terhadap proyek ( $X_7$ ) kemudian indikator Keuntungan sosial ( $X_{10}$ )

### **Pengujian Hipotesis**

Setelah dilakukan perhitungan koefisien dalam model penelitian, selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh Konstruksi Laten Partisipasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab.Subang.

Untuk pengujian hipotesis, digunakan teknik *Bootstrapping* yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar Diagram Path Analysis Model Bootstrapping

Rumusan Hipotesis statistik dapat disajikan sebagai berikut :

- $H_0 : \gamma_{11} < 1,96$  Tidak berpengaruh dari Dimensi terhadap Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang
- $H_1 : \gamma_{11} > 1,96$  Berpengaruh secara signifikan dari Dimensi terhadap Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang

Berdasarkan data signifikan pada gambar bootstrapping, dapat disimpulkan bahwa Dimensi Evaluasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap Konstruk Partisipasi Musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan (BP4D) Kabupaten Subang.

**PENUTUP  
 SIMPULAN**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Musrenbang di Kabupaten Subang, melalui penelitian langsung maupun tidak langsung serta membandingkan antara landasan teori dan kenyataan dilapangan, sekaligus menganalisa dan hasilnya maka dapat ditarik pokok-pokok hasil penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari uraian tiap dimensi sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan, tahap pengambilan keputusan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dan menjamin strategi tersebut terlaksana dengan baik sehingga menjamin kesuksesan Musrenbang dalam jangka panjang terutama partisipasi masyarakatnya akan tetapi Partisipasi Masyarakat dalam keterlibatan merumuskan strategi sangat lemah.
- b. Tahap pelaksanaan. Proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang merupakan proses dalam menjamin strategi apakah dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang akan tetapi Partisipasi Masyarakat dalam Keterlibatan program sangat rendah.

- c. Tahap evaluasi, Dimensi Evaluasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap Konstruksi Partisipasi Musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D) Kabupaten Subang.
- d. Tahap menikmati hasil, dalam dimensi tahap menikmati hasil ini yaitu kebutuhan peserta Musrenbang berhasil secara efektif dan efisien.

2. Dimensi Evaluasi menjadikan faktor yang paling menentukan Konstruksi Partisipasi Musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BP4D). Sementara itu faktor lain yang pengaruh lebih rendah antara Dimensi Menikmati Hasil, Dimensi Tahap pelaksanaan, dan Dimensi Tahap Pengambil Keputusan.

3. Hasil analisis data melalui One Sample Test diketahui  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya hipotesis yang penulis ajukan yaitu "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang optimal", dapat diterima.

#### REFERENSI

Ambadar, J, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia (Wujud Kepedulian Dunia Usaha)*(1sted), Jakarta,

- Penerbit Elex Media Computindo, 2008
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*, Yogyakarta, UGM Press, 2004
- Ghozali, Imam, *Struktural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008
- Hikmat, H, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Humoniora, Bandung, 2004
- Adi, Isbandi Rukminto, *Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas, dari Pemikiran menuju penerapan*. Depok, FISIP UI Press, 2007
- MUBYARTO, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga, Jakarta, LP3ES, 1984
- Nasdian FT, *Materi Kuliah Pengembangan Masyarakat, Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor, 2003
- Sastropoetro, Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung, Alumni, 1988
- SINGARIMBUN, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES
- SUGIYONO, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2007
- Slamet, Y, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 1994
- Syahyuti, Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan Pertanian, Jakarta, Bina Rena Pariwara, 2006
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Penerbit, GavaMedia, 2004
- Sunarti, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*, Jurnal Tata Loka, Semarang, Planologi UNDIP, 2003
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset, 2003